

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARASI,
PERAN PERANGKAT DESA, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI KECAMATAN DAWE KUDUS**

**Usulan Penelitian Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh:
Azalea Puspita
Nim : 31402200128**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARASI, PERAN
PERANGKAT DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
KECAMATAN DAWE KUDUS**

**Usulan Penelitian Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**



**Disusun Oleh:
Azalea Puspita
Nim : 31402200128**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PERAN

PERANGKAT DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI

KECAMATAN DAWE KUDUS





HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PERAN PERANGKAT DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN DAWE KUDUS



Ketua Program Studi S-1 Akuntansi

Provita Wijayanti, SE,M.Si, Ak,CA,IFP,AWP,Ph.D
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Azalea Puspita

Nim : 31402200128

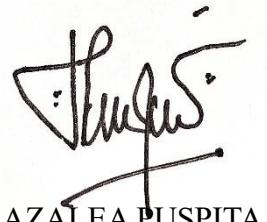
Fakultas : Ekonomi

Program Studi : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan penelitian skripsi berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Peran Perangkat Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Dawe Kudus” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam usulan penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 01 Agustus 2025

Yang menyatakan



AZALEA PUSPITA

NIM: 31402200128

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

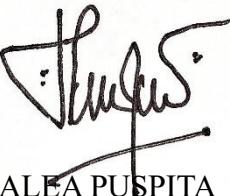
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: AZALEA PUSPITA
Nim	: 31402200128
Program Studi	: S1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Peran Perangkat Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Dawe Kudus”** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 Agustus 2025



AZALEA PUSPITA

NIM: 31402200128

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“It Will Pass”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Orang Tua tercinta
3. Tunangan Saya soon to be Suami Saya
4. Keluarga besar tercinta
5. Sahabat dan teman-temanku tercinta



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Pengelolaan keuangan desa yang efektif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat desa dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, keempat variabel independen—yakni akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat—berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Nilai t hitung masing-masing variabel lebih besar dari t tabel (1,988) dan nilai signifikansi $< 0,05$. Secara simultan, keempat variabel memberikan kontribusi sebesar 64,9% terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa, sementara sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Temuan ini mendukung teori *good village governance* yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola keuangan desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa dan penguatan peran serta masyarakat agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Peran Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa.

ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of accountability, transparency, the role of village officials, and community participation on village financial management in Dawe District, Kudus Regency. Effective village financial management is an important foundation in realizing good village governance. This study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis techniques. Data were obtained by distributing questionnaires to village officials and communities involved in village financial management. The results of the analysis indicate that partially, the four independent variables—namely accountability, transparency, the role of village officials, and community participation—have a positive and significant influence on village financial management. The calculated *t* value of each variable is greater than the *t* table (1.988) and the significance value is <0.05. Simultaneously, the four variables contribute 64.9% to the quality of village financial management, while the remaining 35.1% is influenced by other variables outside this research model. These findings support the theory of good village governance which emphasizes the importance of accountability, transparency, participation, and the capacity of village officials in village financial management. This study recommends increasing the capacity of village officials and strengthening community participation to ensure optimal and sustainable village financial management.*

Keywords: Accountability, Transparency, Role of Village Officials, Community Participation, Village Financial Management.

INTISARI

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan aset desa. Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan tetapi telah menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan di Indonesia (Sulomin, 2015). Hal ini ditandai dengan dialokasikannya dana desa yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Pada tahun 2015, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp20,7 triliun, meningkat menjadi Rp72 triliun pada tahun 2021. Peningkatan alokasi dana yang substansial ini memerlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif untuk menjamin dana tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.

Meskipun regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menggantikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hingga tahun 2020 terdapat 900 kasus penyimpangan dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp40 miliar (Kementerian Desa PDTT, 2020). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan yang baik. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2018). Sementara transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Mahmudi, 2016). Penelitian terdahulu oleh Widyatama et al. (2017) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sleman. Namun, studi yang dilakukan Novitasari (2019) justru

menunjukkan hasil yang berbeda di Kabupaten Purworejo. Inkonsistensi hasil penelitian ini menunjukkan adanya variabel kontekstual yang perlu dipertimbangkan dalam menilai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.

Selain akuntabilitas dan transparansi, peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Rosalinda (2014) mengungkapkan bahwa kompetensi dan kapasitas perangkat desa menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan dana desa. Sementara itu, Supriyanto (2017) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Namun, studi komprehensif yang mengintegrasikan keempat variabel tersebut dalam konteks pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe Kudus belum pernah dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe Kudus. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik khususnya pada tingkat desa. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dengan mengintegrasikan perspektif akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat dalam satu model penelitian. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe Kudus dan wilayah lain dengan karakteristik serupa.

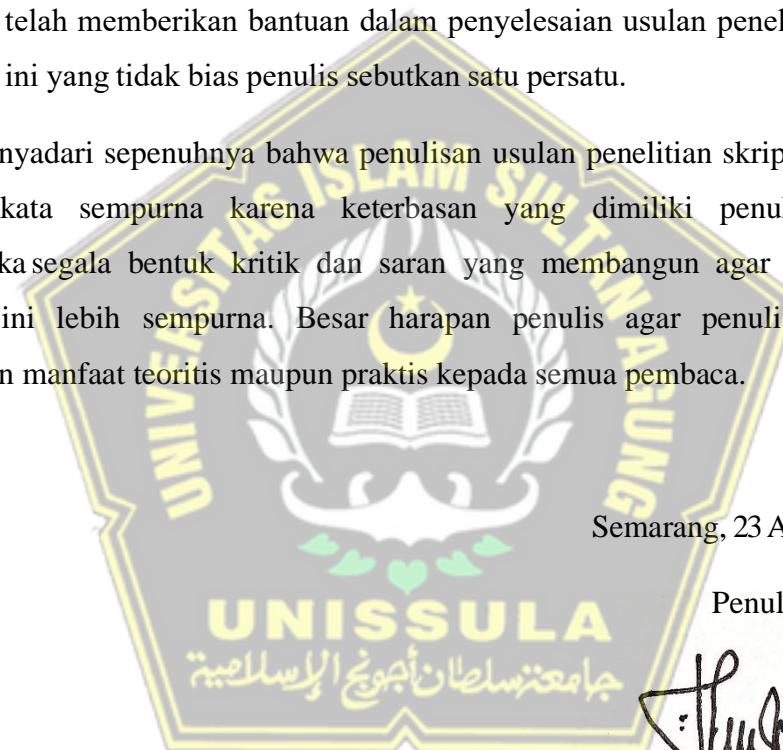
KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini yang berjudul *“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PERAN PERANGKAT DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN DAWE KUDUS”* Penyusunan usulan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi Sarjana (S1) dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistiyo, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., MSi, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Sri Anik, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga usulan penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan usulan penelitian skripsi ini.
5. Orang tua kandung penulis yang selalu memberikan dorongan mental dan spiritual, do'a dan kasih sayang yang tiada hentinya dan sangat berharga bagi penulis..
6. Sahabat saya dari SMA yang telah menemani Suka Duka Penulis Selama Ini Alfiona, Devi, Fajar, Salma dan Nia.

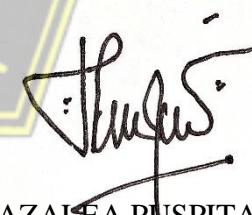
7. Tunangan Saya Riza Ainur Rofiq yang Tahun depan InsyaAllah akan menjadi Suami Penulis.
8. Kepada Bunda Saya, Bunda Almira yang selalu ada dikala penulis membutuhkan dan Ustadzah saya, Ustadzah Enny yang selalu mensupport penulis.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan S1 Akuntansi dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian usulan penelitian skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan usulan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar penyusunan penelitian ini lebih sempurna. Besar harapan penulis agar penulis ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis kepada semua pembaca.



Semarang, 23 Agustus 2025

Penulis



AZALEA PUSPITA

NIM.31402200128

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEETUJUAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 <i>Grand Theory</i> 2.1.1 Akuntabilitas	5
2.1.2 Transparansi	9
2.1.3 Peran Perangkat Desa	12
2.1.4 Partisipasi Masyarakat	17
2.1.5 Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	23
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pemikiran	28
2.4 Hipotesis Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
3.2 Populasi dan Sampel	32

3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Metode Pengumpulan Data	34
3.5 Pengukuran Variabel.....	34
3.6 Uji Kualitas Data (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas)	37
3.6.1 Uji Validitas	37
3.6.2 Uji Reliabilitas	37
3.7 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.7.1 Uji Normalitas.....	38
3.7.2 Uji Multikolinearitas.....	38
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas	39
3.8 Teknik Analisis Data.....	39
3.8.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	39
3.8.2 Uji Goodness of Fit (Uji Kesesuaian Model)	40
3.8.3 Uji Hipotesis	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Sampel.....	42
4.2 Deskripsi Identitas Responden	43
4.2.1 Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	43
4.2.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
4.2.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	44
4.2.4 Identitas Responden Berdasarkan Jabatan/Posisi	45
4.2.5 Identitas Responden Berdasarkan Lama Bertugas/Keterlibatan.....	45
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian	46
4.3.1 Persepsi Responden terhadap Variabel Akuntabilitas	46
4.3.2 Persepsi Responden terhadap Variabel Transparansi.....	48
4.3.3 Persepsi Responden terhadap Variabel Peran Perangkat Desa	49
4.3.4 Persepsi Responden terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat	50
4.3.5 Persepsi Responden terhadap Variabel Kualitas Pengelolaan Dana Desa	52
4.4 Uji Kualitas Data	54
4.4.1 Uji Validitas Data.....	54
4.4.2 Uji Reliabilitas Data.....	56

4.5 Uji Asumsi Klasik.....	56
4.5.1 Uji Normalitas.....	56
4.5.2 Uji Multikolinieritas	57
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	58
4.6 Analisis Data.....	59
4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
4.6.2 Uji Goodness of Fit (Uji Kesesuaian Model)	61
4.6.3 Uji Koefisien Determinasi	62
4.6.4 Uji Hipotesis	63
4.7 Pembahasan	65
4.7.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa	65
4.7.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa	65
4.7.3 Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa	66
4.7.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa	66
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Implikasi	68
5.3 Keterbatasan Penelitian	69
5.4 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	34
Tabel 4.1 Jumlah Kuesioner	43
Tabel 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia	43
Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	44
Tabel 4.5 Identitas Responden Berdasarkan Jabatan/Posisi	45
Tabel 4.6 Identitas Responden Berdasarkan Lama Bertugas/Keterlibatan	45
Tabel 4.7 Persepsi Responden terhadap Variabel Akuntabilitas	47
Tabel 4.8 Persepsi Responden terhadap Variabel Transaparansi	48
Tabel 4.9 Persepsi Responden terhadap Variabel Peran Perangkat Desa	49
Tabel 4.10 Persepsi Responden terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat	51
Tabel 4.11 Persepsi Responden terhadap Variabel Kualitas Pengelolaan Dana Desa	52
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas	54
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas	56
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas	57
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinieritas	57
Tabel 4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi	59
Tabel 4.18 Hasil Uji F	61
Tabel 4.19 Hasil Uji t	63
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 Tangga Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein (1969).....27

Gambar 2.3.1 Kerangka Pemikiran.....Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah (Nasution, 2019). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum bagi desa untuk memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, yang dikenal sebagai otonomi desa. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan yang harus dilakukan secara akuntabel. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan atas akuntabilitas, transparansi, serta tertib dan disiplin anggaran (Artasandi et al., 2024). Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan setiap aspek pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat sebagai pemegang amanah (Puspa & Prasetyo, 2020). Sementara itu, transparansi berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat, serta kemudahan akses terhadap informasi publik (Saputra & Farhan, 2021).

Peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan sangat krusial karena mereka bertanggung jawab dalam memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kapasitas perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan tata kelola keuangan desa. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi et al. (2022) menemukan bahwa kompetensi dan

profesionalisme perangkat desa berhubungan erat dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa yang digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mencakup pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Melalui APBDes, diharapkan desa mampu mengembangkan potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan APBDes dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa (MUSDES) di tingkat RW, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES) di tingkat desa. Proses ini melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Tim Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Regulasi dan mekanisme pengawasan telah diterapkan, tetapi masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi tata kelola keuangan desa yang baik. Kasus penyelewengan APBDes oleh perangkat desa masih sering terjadi. Di Kabupaten Kudus, beberapa kasus penyalahgunaan Dana Desa terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, di Kecamatan Dawe, kasus penyelewengan terjadi di Desa Tergo dan Desa Lau. Selanjutnya, pada tahun 2023, Kepala Desa Undaan Kidul di Kecamatan Undaan juga terjerat kasus serupa. Selain itu, penyalahgunaan aset desa juga menjadi permasalahan, seperti kasus eks Sekretaris Desa Cendono yang menyalahgunakan tanah kas desa selama masa jabatannya (2002–2021) dan baru dijatuhi hukuman pada tahun 2024.

Berbagai permasalahan ini umumnya disebabkan oleh lemahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat perangkat desa, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi, serta masih kuatnya budaya birokrasi tertutup. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penghambat, yang disebabkan oleh terbatasnya akses informasi serta minimnya kesadaran masyarakat akan hak mereka dalam pengelolaan keuangan desa. Akibatnya, pengelolaan dana desa sering kali tidak

sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat dan rentan terhadap penyimpangan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Abdul Latif (2021) yang hanya menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa, sementara penelitian Faizzatul Solihah (2022) menunjukkan pengaruh positif peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Yesi Mutia Basril (2022) menekankan signifikansi partisipasi masyarakat dalam efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Bertolak dari kompleksitas tersebut, penelitian ini bermaksud melangkah lebih jauh. Dengan menambahkan variabel peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan desa.

Kecamatan Dawe dipilih sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan. Pertama, kecamatan ini memiliki karakteristik desa yang beragam, sehingga memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dalam berbagai konteks. Kedua, Kecamatan Dawe dianggap representatif bagi kecamatan lain di Kabupaten Kudus, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat digeneralisasi untuk wilayah yang lebih luas. Selain itu, ketersediaan data serta kemudahan akses ke lokasi penelitian juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan kecamatan ini sebagai objek penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus?”. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus?

- b. Apakah transparansi dalam pengelolaan keuangan desa mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus?
- c. Apakah peran perangkat desa berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus?
- d. Apakah partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan pada penelitian ini adalah,

- a. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
- b. Menganalisis sejauh mana transparansi dalam pengelolaan keuangan desa mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
- c. Menganalisis kontribusi peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
- d. Menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan akuntansi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah, memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa.
- b. Bagi Masyarakat Desa, meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
- c. Bagi Peneliti Lain, menyediakan dasar empiris untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Akuntabilitas

2.1.1.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas, yang secara etimologis berasal dari kata "accountability" dalam bahasa Inggris, merujuk pada kewajiban suatu entitas untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas menjadi landasan bagi perangkat desa untuk mengelola sumber daya dan keuangan desa secara transparan dan bertanggung jawab (Adisasmita, 2011).

Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2004) akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa adalah suatu kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang ada, baik kepada masyarakat desa maupun kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa dan pemerintah.

Definisi lain, Endahwati (2014) mengartikan akuntabilitas sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau pengusaha yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan control

terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban moral dan legal bagi individu atau organisasi untuk memberikan penjelasan, pertanggungjawaban, dan laporan atas tindakan dan keputusan yang telah diambil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas tidak hanya melibatkan aspek teknis seperti pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup aspek sosial seperti keterlibatan masyarakat dan hubungan dengan pihak-pihak terkait.

2.1.1.2 Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (2000) disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas, perlu diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, yaitu:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh pengurus untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan.
3. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pengguna sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi dan manfaat yang sudah diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai peran perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa memiliki dimensi yang saling terkait dan saling memperkuat. Menurut Madiasmo (2004) dimensi akuntabilitas terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal mencerminkan hubungan hierarkis antara perangkat desa dengan pemerintah tingkat yang lebih tinggi. Perangkat desa berkewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal menyoroti interaksi antara perangkat desa dengan lembaga lain di tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam dimensi ini, perangkat desa harus mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPD dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa.

2.1.1.4 Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas pada dasarnya adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang harus terjadi. Apabila terjadi suatu kendala, atau penyimpangan, maka penyimpangan dan kendala tersebut harus segera dikoreksi. Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh J.B. Ghartery (2004) bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan, yaitu apa, mengapa, siapa, yang mana, ke mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban dilaksanakan.

Dari tujuan yang telah dikemukakan diatas, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga bias segera diperbaiki apabila terjadi suatu kesalahan.

2.1.1.5 Manfaat Akuntabilitas

Akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan desa dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Ketika perangkat desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dengan transparan, masyarakat akan lebih percaya dan mendukung program-program yang dilaksanakan.

2. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Akuntabilitas yang baik dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan, sehingga program-program yang dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Dengan adanya akuntabilitas, perangkat desa akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan dan sumber daya desa, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan efektif.

4. Mengurangi Penyalahgunaan Kekuasaan

Akuntabilitas dapat menjadi mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

2.1.1.6 Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas memiliki beberapa indikator yaitu:

1. Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*).
2. Proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.
3. Program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.2 Transparansi

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan konsep fundamental dalam pengelolaan pemerintahan dan organisasi publik, termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Secara sederhana, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memahami segala sesuatu terkait kebijakan, keputusan, dan aktivitas suatu organisasi. Dalam konteks desa, transparansi mewajibkan perangkat desa untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu mengenai pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai pengelolaan keuangan daerah, termasuk kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan hasil yang dicapai. Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh infomasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Beberapa ahli memberikan definisi transparansi yang mencerminkan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan organisasi:

1. Mardiasmo (2002) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik menyatakan bahwa transparansi adalah "keterbukaan dalam pengelolaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik." Hal ini menunjukkan bahwa transparansi sangat penting dalam menciptakan akuntabilitas di sektor publik.

2. Sukardi (2005) dalam bukunya Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik mengemukakan bahwa transparansi adalah "proses di mana informasi disampaikan kepada publik dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti." Menurutnya, transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan bagaimana informasi tersebut disajikan agar dapat dipahami oleh masyarakat.
3. Dharmawan (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa "transparansi adalah suatu kondisi di mana informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik disediakan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat." Ia menekankan bahwa transparansi merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah suatu kondisi di mana informasi mengenai pengelolaan keuangan desa disediakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi tidak hanya mencakup penyediaan informasi, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, transparansi merupakan pilar penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

2.1.2.2 Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Keterbukaan Informasi

Informasi yang harus dipublikasikan tidak hanya terbatas pada laporan keuangan, namun juga meliputi rencana anggaran, hasil audit, data penerima manfaat, dan hasil evaluasi program. Informasi ini harus disajikan secara jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

2. Kejelasan dan Keterpahaman

Informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penggunaan bahasa yang sederhana dan penyajian informasi

yang sistematis dapat membantu masyarakat dalam memahami informasi yang diberikan.

3. Konsistensi dan Ketepatan Waktu

Informasi harus disampaikan secara konsisten dan tepat waktu. Laporan keuangan dan informasi lainnya harus disajikan secara berkala agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pengelolaan keuangan desa.

4. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam perencanaan dan pengawasan. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.1.2.3 Indikator Transparansi

Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan daerah mereka sendiri.

Dalam Krina (2003) menyebutkan ada beberapa alat ukur transparansi yaitu:

1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi: annual reports, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.
2. Informasi yang disajikan: acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.

3. Penanganan keluhan: berita-berita kota di media massa dan lokal, notice of respon, limit waktu respon, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, service users surveys.
4. Institusi dan organisasi daerah: Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
5. Pertemuan masyarakat
6. Mimbar rakyat.

Melalui penjelasan Krina diatas dapat dipahami bahwa seharusnya pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang jalannya pemerintahan daerah mereka dengan cara mentransparansikan laporan laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol berjalannya pemerintah desanya sendiri.

2.1.3 Peran Perangkat Desa

2.1.3.1 Pengertian Perangkat Desa

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang mengakdedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perangkat desa merupakan salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK), kedudukan perangkat desa adalah ‘pembantu’ bagi kepala desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Seksi

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa peran perangkat desa adalah pelaksana kebijakan desa, pelayan masyarakat, penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, dan penjaga integritas pemerintah desa. Dengan demikian, perangkat desa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

2.1.3.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Perangkat desa memiliki berbagai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan desa. Beberapa tugas dan fungsi tersebut antara lain:

1. Pelayanan Administrasi: Perangkat desa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, seperti pembuatan surat-surat, pengelolaan data kependudukan, dan penyelenggaraan kegiatan desa.
2. Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran: Perangkat desa terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran desa. Mereka harus menyusun rencana anggaran tahunan yang mencakup semua kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di desa.
3. Pelaksanaan Program Pembangunan: Perangkat desa bertugas untuk melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan. Mereka harus memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

4. Pengawasan dan Evaluasi: Perangkat desa juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan desa. Mereka harus melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
5. Membangun Hubungan dengan Masyarakat: Perangkat desa harus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Mereka harus mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.3.3 Struktur Organisasi Perangkat Desa

Struktur organisasi perangkat desa di Kecamatan Dawe secara umum terdiri beberapa jabatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, antara lain:

a. Kepala Desa

Kepala desa bertugas untuk:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan – peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran belanja desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina ekonomi desa.
7. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewaili desanya didalam dan luar pengadilan dan dapat merunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang–undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

b. Sekretaris Desa

Tugas pokoknya adalah membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa,

mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun fungsi dari sekretaris desa yaitu,

1. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
2. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan.
3. Melaksanakan tugas kepala desa apabila pala desa diberhentika sementara.
4. Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa.
5. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan permerintahan desa.
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas–tugas urusan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

c. Bendahara Desa

Bendahara desa memiliki tugas pokok yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa. Adapun fungsi dari bendahara desa adalah sebagai:

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa.
2. Mempersiapkan bahan untuk menyusun anggaran pendapatan belanja desa.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

d. Kaur Pemerintahan

Kaur Pemerintahan memiliki tugas pokok yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Adapun fungsi kaur pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
2. Persiapan bahan–bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.

3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
4. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa.
5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaran pemerintah desa
6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepada desa.

e. Kaur Pembangunan

Kaur Pembangunan memiliki tugas pokok yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Fungsi dari kaur pembangunan adalah sebagai:

1. Penyiapan bantuan–bantuan analisa dan kajian pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan.
3. Pengelolaan tugas pembantuan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

f. Kaur Sosial Kemasyarakatan

Kaur Sosial kemasyarakatan memiliki tugas pokok yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Fungsi dari Kaur Sosial kemasyarakatan adalah sebagai:

1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
2. Pelaksanaan pencatatan investarisasi kekayaan desa.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum.
4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor dan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
5. Pengelolaan administrasi perangkat desa.
6. Persiapan bahan bahan untuk laporan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

2.1.4 Partisipasi Masyarakat

2.1.4.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2007) Partisipasi masyarakat yakni keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi kasus dan keahlian yang ada di warga, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif pemecahan buat mengatasi permasalahan. Partisipasi masyarakat adalah hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan perlindungan lingkungan, masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas dan manfaat, tetapi juga sebagai tema pembangunan berkelanjutan (Dewi, 2013).

Partisipasi menurut Suryono (2001) adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan partisipasi dalam pemanfaatan dan penikmatan hasil pembangunan.

Sudriamunawar (2006) menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pembangunan nasional menuntut adanya partisipasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat akan menunjang dalam pengelolaan potensi daerah, sehingga proses pembangunan akan berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Partisipasi berarti individu atau kelompok masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan dalam bentuk presentasi dan kegiatan dengan memberikan masukan berupa ide, tenaga, waktu, keahlian, dana atau material, serta berpartisipasi dalam pemanfaatan dan penikmatan hasil pembangunan

Berdasarkan isi di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan rencana atau kebijakan yang dapat memberikan manfaat dan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. (Sumaryadi, 2010).

2.1.4.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Mengenai bentuk partisipasi masyarakat, menurut Yadav (dalam UNAPDI, 1980), ada empat bentuk partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Forum tersebut perludigunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah dimana masyarakat tersebut berada, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan rencana pembangunan daerah.
- b. Berpartisipasi dalam pengembangan dan implementasi Artinya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, kontribusi masyarakat harus merata dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan/atau pengorbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima setiap warganegara/masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan Masyarakat perlu berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi rencana dan kegiatan pembangunan untuk memahami apakah tujuan yang dicapai sesuai dengan harapan. Selain itu, mendapatkan umpan balik atas permasalahan/keterbatasan dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung.
- d. Ikut serta dalam pemanfaatan hasil pembangunan Seringkali masyarakat tidak secara langsung memahami manfaat dari setiap program pembangunan, sehingga menyia-nyiakan hasil pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi masyarakat dan mau dan mau menggunakan hasil pembangunan, seperti penggunaan jembatan penyeberangan.

Bentuk partisipasi, menurut Erikson seperti dikutip Slamet (1994) yang diberikan kepada masyarakat dalam tahapan pembangunan memiliki beberapa bentuk yang dibagi jadi 3 tahapan, ialah:

- a. Berpartisipasi dalam tahap perencanaan (creative planning stage). Partisipasi dalam tahap tujuan adalah persiapan komite dan anggaran bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan/proyek selama tahap perencanaan dan persiapan strategis. Komunitas dapat berpartisipasi dalam konferensi dengan memberikan saran, saran, dan kritik. Berpartisipasi dalam tahap implementasi.

- b. Partisipasi pada tahap ini mengacu pada partisipasi seseorang dalam tahap pelaksanaan proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang atau bahan/komoditas, serta ide sebagai bentuk partisipasi dalam berkarya. Berpartisipasi dalam pemanfaatan.
- c. Partisipasi pada tahap ini berarti seseorang ikut serta dalam tahap pemanfaatan proyek setelah proyek selesai. Pada tahap ini, masyarakat berpartisipasi dalam operasi berupa tenaga dan uang, serta memelihara proyek yang telah selesai

Menurut Keith Davis (Intan dan Mussadun, 2013), bahwa bentuk dari partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- a. Pikiran adalah partisipasi melalui ide atau gagasan individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.
- b. Tenaga adalah partisipasi pemanfaatan tenaga yang dimiliki kelompok dan individu untuk mencapai apa yang diinginkan.
- c. Pikiran dan Tenaga adalah partisipasi yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.
- d. Keterampilan dan kemahiran adalah jenis keterlibatan, di mana keahlian merupakan faktor yang paling diinginkan dalam menentukan aspirasi.
- e. Barang adalah jenis partisipasi di mana partisipasi dilakukan melalui barang untuk membantu mencapai hasil yang diinginkan.
- f. Uang adalah jenis partisipasi dengan menggunakan uang sebagai alat untuk mencapai apa yang diinginkan. Seringkali tingkat partisipasi dilakukan oleh mereka kalangan atas.

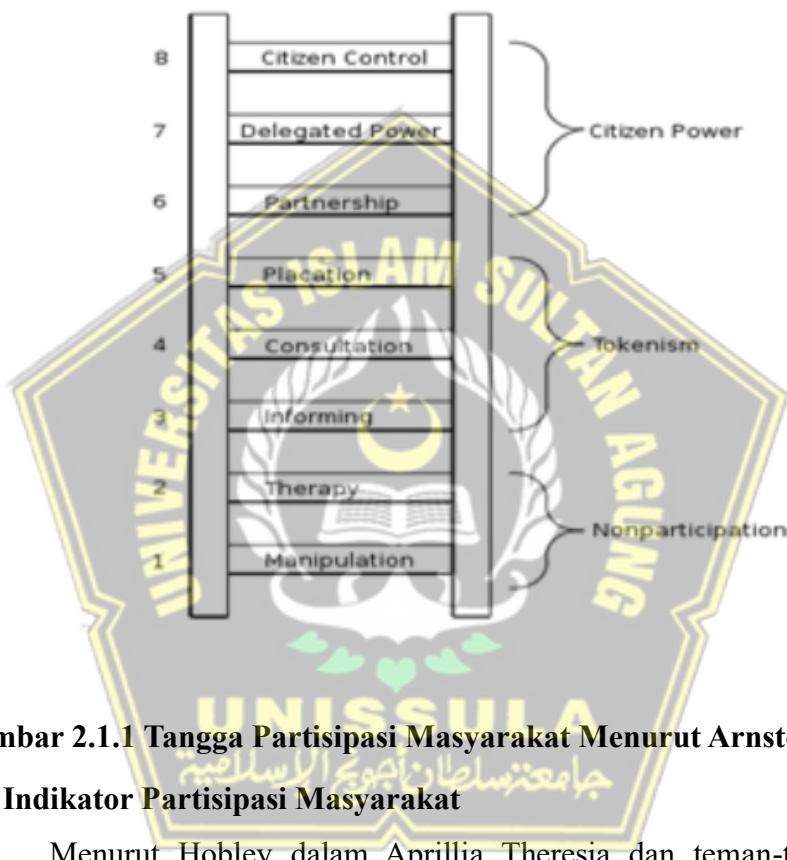
2.1.4.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, perlu adanya inisiatif serta kreatifitas dari masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik secara pembuatan rencana pelaksanaan dan evaluasi pembangunan jadi tolak ukur keahlian masyarakat buat berinisiatif serta menikmati hasil pembangunan yang sudah dilakukan.

Menurut pernyataan Sherry R Arnstein yang dikutip oleh Sigit, bahwa membagi partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat.

- a. *Citizen control*: Masyarakat mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur programmaupun lembaga yang berkaitan dengan kepentingan
- b. *Delegated power*: Masyarakat terlibat dalam berdiskusi serta membuat keputusan pada rencana tertentu.
- c. *Partenrship*: Masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah.
- d. *Placation*: Pemerintah menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan.
- e. *Concultation*: Masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- f. *Informing*: Pemerintah hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpanbalik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat.
- g. *Therapy*: Pemerintah memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih ada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.
- h. *Manipulation*: Tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

Menurut Arnstein tingkatan partisipasi diatas dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu *Non-participant* yang meliputi *manipulasi* dan *therapy*, partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau *degrees of tokenism* meliputi *informing*, *consultation*, dan *placation*, sedangkan partisipasi masyarakat yang mempunyai kekuasaan yaitu meliputi *partnership*, *delegated power* dan *citizen power*.



Gambar 2.1.1 Tangga Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein (1969)

2.1.4.4 Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut Hobley dalam Aprillia Theresia dan teman-teman (2014) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan Karakteristiknya, yaitu:

1. Partisipasi pasif/manipulative, dengan karakteristik;
 - a. Masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi.
 - b. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat.
 - c. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran.
2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi, dengan karakteristik;

- a. Masyarakat menanggapi pertanyaan- pertanyaan penelitian
- b. Masyarakat tidak diberi peluang buat ikut serta serta pengaruh proses riset Akurasi hasil riset tidak dibahas bersama masyarakat

3. Partisipasi melalui konsultasi, dengan karakteristik;
 - a. Masyarakat berpartisipasi dengan metodeberkonsultasi, orang luar mencermati, menganalisis permasalahan serta pemecahannya.
 - b. Tidak terdapat kesempatan pembuatankeputusan bersama para profesional tidakberkewajiban buat mengajukan pemikiran–pandangan.
 - c. Masyarakat (selaku masukan) buat ditindaklanjuti.
4. Partisipasi insentif, dengan karakteristik;
 - a. Masyarakat membagikan kurban/ jasanya buat mendapatkan imbalan berbentukinsentif/ upah.
 - b. Masyarakat tidak dilibatkan dalamproses pendidikan ataupun eksperimen- eksperimen yang dicoba.
 - c. Masyarakat tidak mempunyai andil buat melanjutkan kegiatan- kegiatan sehabis insentif dihentikan.
5. Partisipasi fungsional, dengan karakteristik;
 - a. Masyarakat membentuk kelompok buat menggapai tujuan perencanaan.
 - b. Pembuatan kelompok (umumnya) setelah mendapat keputusan- keputusan utama yang disepakati.
 - c. Pada awal mulanya, warga ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) namun secara bertahap menampilkan kemandiriannya.
6. Partisipasi fungsional, dengan karakteristik;
 - a. Masyarakat berperan dalamanalisis perencanaan aktivitas serta pembuatanataupun penguatan kelembagaan.
 - b. Cenderung menggunakan tata carainterdisipliner yang mencari keragamanperspektif dalam proses belajar yangterstruktur serta sistematis.
 - c. Masyarakat mempunyai kedudukan buat mengendalikan atas(penerapan) keputusan- keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam totalitas proses kegiatan.

7. Self mobilization, dengan karakteristik;
 - a. Masyarakat mengambil inisiatif secara luas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk mengganti sistem ataupun nilai-nilai yang mereka miliki.
 - b. Masyarakat meningkatkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk memperoleh bantuan-bantuan teknis serta sumber energi yang di perlihatkan.
 - c. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber energi yang terdapat serta digunakan.

2.1.4.5 Indikator Partisipasi Masyarakat

Adapun indikator partisipasi masyarakat menurut Mardikanto Totok dan Soebiato Poerwoko (2015) antara lain sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam pengembalian keputusan adalah setiap program pembangunan termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan sering kali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan.
- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi program/proyek pembangunan sangat diperlukan.
- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan karena tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan bersama.

2.1.5 Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.5.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Republik Indonesia, 2018). Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa terdapat 3 (tiga) azas yaitu akuntabilitas,

partisipatif dan transparan yang bertujuan agar keuangan Desa dapat dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian dan output yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Desa.

Setiap Desa harus membuat laporan keuangan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan Desa. Laporan keuangan dibuat dengan menggunakan basis kas yaitu pencatatan transaksi yang dilakukan pada saat kas masuk maupun keluar dari rekening kas umum.

2.1.5.2 Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Desa

Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa mencakup 5 aspek yang dapat diuraikan di bawah ini,

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam hal ini Sekretaris Desa yang melakukan koordinasi atas penyusunan rancangan APB Desa dengan berdasar pada RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota disetiap tahunnya (Republik Indonesia, 2018)

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan rangkaian kegiatan berupa penerimaan dan pengeluaran Desa yang pelaksanaannya melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Untuk pelaksanaan kegiatan anggarannya, kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi sesuai tugasnya menyusun DPA antara lain rencana kegiatan dan anggaran Desa, rencana kerja kegiatan Desa, dan rencana anggaran biaya

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan yang bertugas sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan melakukan pencatatan setiap terjadinya penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Adapun buku pembantu kas umum yang wajib dibuat meliputi buku pembantu bank, pajak, dan panjar.

Atas pencatatan yang telah dilakukan, pencatatan tersebut ditutup setiap akhir bulan oleh kaur keuangan kepada sekretaris Desa dengan maksimal pengumpulan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Berlanjut sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan tersebut dan pada akhirnya laporan baru bisa disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan (Republik Indonesia, 2018).

d. Pelaporan

Pada tahap pelaporan, laporan pelaksanaan APB yang dibuat terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Untuk penyusunannya, Kepala Desa melakukan penyusunan dengan menggabungkan seluruh laporan tersebut dengan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Setelah melakukan penyusunan laporan, kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB semester pertama kepada Bupati/ Wali Kota melalui camat. Lalu Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan maksimal penyampaian pada minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan (Republik Indonesia, 2018).

e. Pertanggungjawaban

Rangkaian pengelolaan keuangan desa yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Pada tahap ini, kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/ Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Terdapat batasan dalam pengumpulan laporan pertanggungjawabannya. Maksimal pelaporan pertanggungjawaban dilakukan pada 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Desa yang disertai dengan:

1. Laporan keuangan, yang terdiri atas;
 - a) Laporan realisasi APB Desa
 - b) Catatan atas Laporan Keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan

3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa (Republik Indonesia, 2018).

2.1.5.3 Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi merupakan pengawasan terhadap manajemen keuangan desa yang telah diawasi dengan BPD yang memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa dan hasil pembangunan. Karena pemerintah ini memiliki kewajiban dalam mengawasi pelaksanaan dalam penyaluran dana desa, alokasi dan pada kegiatan lainnya (Hasman Husin Sulumin, 2015).

Dalam pengawasan dan juga evaluasi sangat penting dalam menilai pelaksanaan program rencana, apakah dana digunakan dalam semestinya atau tujuannya tecapai secara optimal, disini terdapat beberapa hal yang perlu diamati dalam pengawasan dan evaluasi:

1. Badan perwakilan desa (BPD) bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa.
2. Pemerintah Desa, BPD dan juga masyarakat besama-sama meninjau kembali dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan.
3. Pemerintah desa, BPD dan masyarakat menilai suatu hasil pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan dalam masalah atau kendala.
4. Pemerintah desa, BPD dan juga masyarakat mencari faktorfaktor penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya.
5. BPD dan masyarakat menilai dana yang digunakan dengan cara efektif dan efisien.
6. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam sebuah program keuangan kepada BPD, masyarakat dan kabupaten.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi kajian penting dalam bidang tata kelola pemerintahan desa. Berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai

faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa, seperti akuntabilitas, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat. Untuk memberikan landasan yang kuat dalam penelitian ini, berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan penguatan dalam penyusunan kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis penelitian.

Tabel II.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil
1	(Alfiani & Estiningrum, 2021)	Y: Pengelolaan Keuangan Desa X1: Akuntabilitas X2: Transparansi X3: Sistem Akuntansi Keuangan Desa	Variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, sistem akuntansi keuangan desa (X3) berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan desa.
2	(Latif & Savitri, 2021)	Y: Pengelolaan Keuangan Desa X1: Akuntabilitas X2: Transparansi X3: Kualitas Sumber Daya Manusia	Variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan kualitas sumber daya manusia (X3) berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.
3	(Subandra, 2022)	Y: Pengelolaan Keuangan Desa X1: Transparansi X2: Akuntabilitas X3: Partisipasi Masyarakat	Variabel akuntabilitas (X2) dan partisipasi masyarakat (X3) berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan transparansi (X1) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
4	(Sukmawati & Nurfitriani, 2019)	Y: Pengelolaan Keuangan Desa X1: Transparansi	Variabel akuntabilitas (X2) berpengaruh positif terhadap pengelolaan

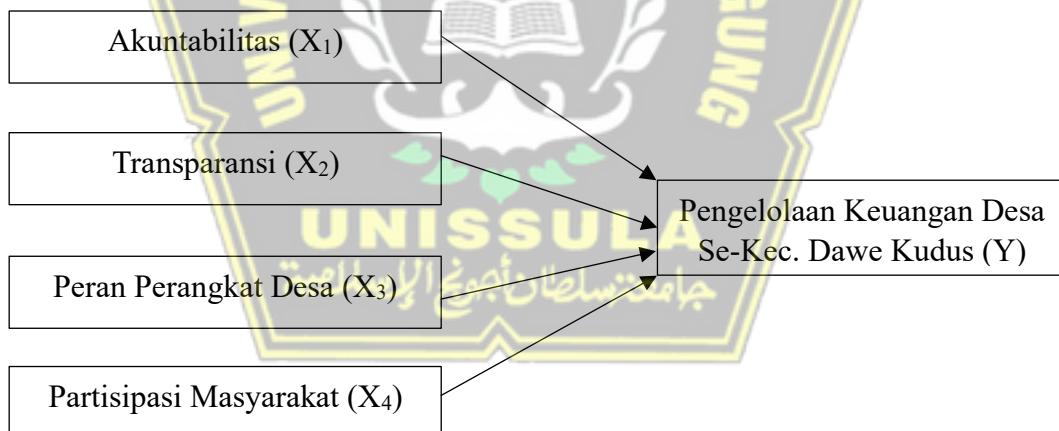
		X2: Akuntabilitas	keuangan desa, sedangkan transparansi (X1) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
5	(Faizzatus Solihah et al., 2022)	Y: Pengelolaan Keuangan Desa X1: Transparansi X2: Akuntabilitas X3: Peran Perangkat Desa	Variabel transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan peran perangkat desa (X3) berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.
6	(Mutia Basri et al., 2020)	Y: Pengelolaan Keuangan Desa X1: Transparansi X2: Akuntabilitas X3: Partisipasi Masyarakat X4: Kualitas Sumber Daya Manusia	Variabel transparansi (X1), akuntabilitas (X2), partisipasi masyarakat (X3), dan kualitas sumber daya manusia (X4) berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.
7	(Angelia & Rahayu, 2020)	Y: Pengelolaan Keuangan Desa X1: Transparansi X2: Akuntabilitas X3: Partisipasi Masyarakat	Variabel akuntabilitas (X2) dan partisipasi masyarakat (X3) berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan transparansi (X1) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Kualitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, tingkat kepatuhan terhadap peraturan, efektifitas penggunaan dana, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.

Peneliti berhipotesis bahwa terdapat hubungan kausalitas positif antara sejumlah variabel independen dengan kualitas pengelolaan keuangan desa. Variabel independen yang kami pertimbangkan meliputi akuntabilitas perangkat desa, transparansi dalam pengelolaan keuangan, perang perangkat desa, dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas yang tinggi pada perangkat desa akan mendorong mereka untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, Akuntabilitas yang tinggi pada perangkat desa akan mendorong mereka untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan. Tak kalah pentingnya peran perangkat desa yang memiliki kapasitas yang baik (pendidikan, pengalaman) akan mampu menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Serta Peningkatan kepercayaan masyarakat akan mendorong partisipasi aktif mereka dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa.

Kerangka pemikiran ini dapat digambarkan dengan diagram yang disajikan dibawah ini,



Gambar 2.3.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan *grand theory* dan hasil temuan dari beberapa penelitian sebelumnya, terdapat sejumlah faktor yang diyakini memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. Di antaranya adalah akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat. Masing-masing

faktor ini akan diuji secara empiris melalui perumusan hipotesis yang didasarkan pada kajian literatur dan hasil penelitian terdahulu.

Hipotesis pertama untuk variabel akuntabilitas, yang merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa yang akuntabel akan selalu menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara sistematis dan terbuka. Penelitian yang dilakukan oleh Puspa & Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas yang tinggi mampu mencegah terjadinya penyimpangan dana desa dan mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif. Oleh karena itu, dalam konteks ini, diasumsikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut maka,

H_1 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Hipotesis kedua ditujukan untuk variabel transparansi, yang merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem pemerintahan desa yang terbuka dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transparansi mencerminkan sejauh mana informasi mengenai anggaran desa disampaikan secara terbuka, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi tersebut dapat turut mengawasi dan memberikan masukan atas pengelolaan dana desa. Studi yang dilakukan oleh Saputra & Farhan (2021) serta Faizzatul Solihah et al. (2022) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, maka semakin efektif penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka,

H_2 : Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Hipotesis ketiga berkaitan dengan peran perangkat desa, yang merupakan pelaksana teknis kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Perangkat desa yang kompeten dan memiliki integritas tinggi akan lebih mampu menjalankan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, dan akuntabel. Faizzatul

Solihah et al. (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa peran perangkat desa memiliki hubungan positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu, peran aktif dan profesionalisme perangkat desa menjadi variabel penting yang layak untuk diuji dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka,

H₃ : Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Hipotesis keempat difokuskan pada partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan warga desa dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan keuangan desa. Partisipasi masyarakat yang tinggi dapat memperkuat kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan desa, serta mengurangi potensi penyimpangan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Mutia Basril et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut maka,

H₄ : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (explanatory research). Penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu menguji apakah suatu variabel memengaruhi variabel lainnya. Menurut Ghazali (2016), penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Dalam konteks penelitian ini, hubungan yang diuji adalah antara variabel akuntabilitas, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat (sebagai variabel independen) terhadap pengelolaan keuangan desa (sebagai variabel dependen).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengungkap hubungan kausal antara variabel penelitian. Pendekatan kuantitatif, adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Penelitian dilakukan terhadap sampel tertentu dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel purposive sampling digunakan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur variabel-variabel penelitian secara objektif dan menguji hipotesis penelitian secara statistik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian dan dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang berjumlah 18 desa. Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, yang dianggap dapat mewakili

seluruh populasi (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada di wilayah kerja masing-masing desa di Kecamatan Dawe.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Proportional Stratified Random Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel pada populasi yang memiliki karakteristik heterogen (berstrata), di mana pengambilan dilakukan secara acak dan proporsional dari setiap subpopulasi atau strata (Sugiyono, 2017). Strata dibentuk berdasarkan ukuran dana desa (besar, sedang, dan kecil). Setelah desa-desa dikelompokan dalam strata tersebut, sampel desa diambil secara acak proporsional dari setiap strata untuk representasi yang adil.

Selanjutnya, **dari** setiap desa yang terpilih sebagai sampel, responden yang terdiri dari perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan anggota perangkat desa terkait lainnya) dan perwakilan masyarakat (anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat aktif dalam kegiatan desa) akan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, yaitu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan desa dan dinamika anggaran di desa masing-masing.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan sumbernya. Jenis data merujuk pada format informasi yang dikumpulkan, apakah berupa angka-angka yang dapat diukur atau deskripsi naratif. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang diperoleh langsung dari jawaban responden. Data ini berupa skor atau angka yang menunjukkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan terkait variabel penelitian.

Selain jenis data, sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau responden yang menjadi objek penelitian (Lenaini, 2021). Data primer dalam penelitian ini adalah responden yang dipilih dari populasi penelitian, yaitu perangkat desa dan perwakilan masyarakat di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang dianggap memiliki pengetahuan dan

pengalaman relevan dengan pengelolaan keuangan desa. Responden ini memberikan informasi langsung kepada peneliti melalui kuesioner yang telah dirancang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian kuantitatif, karena data yang akurat dan relevan sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden secara sistematis (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, kuesioner akan dirancang untuk mengukur variabel-variabel yang berkaitan dengan akuntabilitas perangkat desa, transparansi dalam pengelolaan keuangan, peran perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan kualitas pengelolaan keuangan desa. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari beberapa 2 bagian, yakni identitas responden dan pertanyaan utama. identitas responden yang meliputi informasi demografis responden, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan jabatan. Sedangkan pertanyaan utama memuat Pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian, menggunakan skala Likert (1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju) untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan.

3.5 Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan terdiri dari Akuntabilitas, Transparansi, Peran Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Kualitas Pengelolaan Dana Desa. Setiap variabel memiliki dimensi yang akan diukur melalui butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Berikut penjelasan pengukuran variabel tersebut:

Tabel III.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator (No. Pertanyaan)
----	----------	---------	----------------------------

1	Akuntabilitas (X1)	Pertanggungjawaban	1. Pemerintah desa mempertanggungjawabkan dana desa kepada masyarakat (1) 2. Laporan keuangan dibuat lengkap dan detail (2) 3. Laporan disampaikan tepat waktu (3)
		Bukti dan Penjelasan	4. Keputusan didukung bukti yang jelas (4) 5. Penjelasan alasan di balik keputusan anggaran (7)
		Transparansi Akuntabel	6. Terbuka terhadap kritik dan saran (5)
		Mekanisme Pengawasan	7. Ada mekanisme pengawasan (6)
		Aksesibilitas Pertanggungjawaban	8. Laporan mudah dipahami masyarakat (8)
2	Transparansi (X2)	Keterbukaan Informasi	1. Informasi anggaran mudah diakses (9) 2. Laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka (10) 3. Proses penyusunan anggaran dilakukan secara terbuka (11) 4. Masyarakat mengetahui jumlah dan sumber dana (12)
		Media Informasi	5. Program dan kegiatan disampaikan secara jelas (13) 6. Tersedianya papan informasi desa (14)
		Proses Pengambilan Keputusan	7. Pengambilan keputusan keuangan dilakukan secara terbuka (15)
		Akses Realisasi Anggaran	8. Informasi realisasi anggaran mudah diperoleh (16)

3	Peran Perangkat Desa (X3)	Kompetensi dan Pemahaman	1. Kompetensi mengelola keuangan (17)
			2. Pemahaman peraturan keuangan desa (18)
		Perencanaan dan Pelaksanaan	3. Aktif dalam perencanaan keuangan (19)
			4. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan (20)
		Integritas dan Etika	5. Memiliki integritas tinggi (21)
4	Partisipasi Masyarakat (X4)	Responsivitas dan Kolaborasi	6. Responsif terhadap aspirasi masyarakat (22)
			7. Bekerja sama dalam tim (23)
		Pengembangan Kapasitas	8. Mengikuti perkembangan peraturan terbaru (24)
		Keterlibatan dalam Perencanaan	1. Hadir dalam pertemuan anggaran desa (25)
			2. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana (26)
		Pengawasan dan Evaluasi	3. Ikut mengawasi pelaksanaan program (27)
			4. Aktif bertanya soal penggunaan dana (28)
		Kritik dan Saran	5. Memberikan kritik dan saran membangun (29)
		Keterlibatan Evaluatif	6. Ikut dalam evaluasi program desa (30)
		Kepemilikan dan Tanggung Jawab	7. Merasa bertanggung jawab atas keuangan desa (31)
		Penyampaian Aspirasi	8. Aktif menyampaikan aspirasi di forum (32)
5	Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Perencanaan	1. Perencanaan dilakukan sistematis (33)
		Pelaksanaan	2. Pelaksanaan sesuai rencana (34)
		Penatausahaan	3. Penatausahaan tertib dan teratur (35)

	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	4. Laporan keuangan lengkap dan tepat waktu (36) 5. Pertanggungjawaban sesuai ketentuan (37)
	Prinsip Good Governance	6. Mengikuti prinsip good governance (38)
	Manfaat Program	7. Dana digunakan untuk kegiatan bermanfaat (39)

3.6 Uji Kualitas Data (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas)

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah langkah krusial dalam penelitian untuk memastikan keabsahan atau kevalidan instrumen pengukuran. Instrumen yang valid mampu mengukur secara tepat apa yang dimaksudkan untuk diukur. Salah satu metode untuk menguji validitas adalah dengan melakukan korelasi antara skor setiap butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah butir-butir pertanyaan dalam instrumen memiliki hubungan yang kuat dengan konsep yang ingin diukur. Metode ini membantu peneliti memastikan bahwa setiap pertanyaan mendukung pengukuran konsep secara keseluruhan dan bukan hanya bagian-bagiannya.

Untuk menentukan tingkat validitas instrumen, digunakan nilai degree of freedom (df) yang dihitung dengan rumus $df = n-k$, di mana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstruk. Dengan nilai alpha 0,05, instrumen dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan bernilai positif, maka variabel tersebut valid.(Ghozali, 2016)

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memastikan konsistensi dan keandalan kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur variabel atau konstruk. Kuesioner yang reliabel menghasilkan jawaban yang konsisten dari responden, baik diukur pada waktu yang berbeda atau oleh responden yang berbeda. Uji reliabilitas yang umum digunakan adalah *Cronbach Alpha* (α). Nilai *Cronbach Alpha* menunjukkan tingkat reliabilitas kuesioner. Nilai α yang

lebih tinggi menunjukkan kuesioner yang lebih reliabel. Kuesioner umumnya dianggap reliabel jika nilai α lebih dari 0,6 ($\alpha > 0,6$) (Sugiyono, 2017).

3.7 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat-syarat statistik yang diperlukan agar hasil analisis dapat dipercaya dan valid. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk menghindari adanya bias atau pelanggaran terhadap asumsi dasar regresi yang dapat memengaruhi interpretasi hasil. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah teknik statistik yang dipergunakan dalam analisis kenormalan distribusi data yang dipergunakan pada sebuah penelitian, hasil dari uji normalitas untuk membuktikan bahwa data telah berdistribusi normal atau tidak (Wahyuni & Harto, 2012.). Uji normalitas bertujuan buat menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu ataupun residual memiliki distribusi wajar (Ghozali, 2021). Ada 2 metode untuk menguji normalitas yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2021)

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis uji statistik non-parametrik kolmogorov smirnov. Ketentuan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat nilai signifikansinya dengan batas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data tidak terdistribusi secara normal, sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal.

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah langkah kritis dalam analisis regresi untuk memastikan validitas model. Tujuannya adalah mendeteksi korelasi antara variabel bebas (independen) yang dapat mempengaruhi akurasi dan stabilitas model. Dalam model regresi yang ideal, seharusnya tidak ada korelasi di antara variabel independen. Korelasi tinggi antar variabel independen dapat

menyebabkan inefisiensi dalam estimasi parameter model, menghasilkan koefisien regresi yang tidak stabil, dan membuat interpretasi menjadi sulit. Variabel independen yang tidak berkorelasi disebut ortogonal, dan dalam kondisi ini, nilai korelasi antar variabel independen adalah nol.

Untuk mendeteksi multikolinearitas dalam model regresi, beberapa metode dapat digunakan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2016).

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas penting untuk menilai apakah varians residual dalam model regresi tetap atau bervariasi di antara pengamatan. Jika varians residual tetap, kondisi tersebut disebut homoskedastisitas. Namun, jika varians residual bervariasi, kondisinya disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians error dalam model regresi tidak konstan. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas, salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan melihat grafik scatterplot antara SRESID (residual terstandarisasi) dan ZPRED (nilai prediksi terstandarisasi). Jika grafik menunjukkan pola acak dan titik-titik tersebar di sekitar sumbu Y (0), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika terdapat pola tertentu seperti kurva atau pola teratur lainnya (seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka ini menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi berganda, sebagai metode analisis statistik yang kuat dan serbaguna, memberikan kemampuan untuk memodelkan hubungan antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen secara simultan. Kemampuannya yang luar biasa ini menjadikannya alat yang ideal untuk

berbagai penelitian, karena mampu memenuhi dua tujuan fundamental, yaitu (Sugiyono, 2017):

- a. Memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen.
- b. Menjelaskan dan menganalisis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

Rumus regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y : Pengelolaan Keuangan Desa
 a : Konstanta
 b_1 : Koefisien Regresi Akuntabilitas
 b_2 : Koefisien Regresi Transparansi
 b_3 : Koefisien Regresi Peran Perangkat Desa
 b_4 : Koefisien Regresi Partisipasi Masyarakat
 X_1 : Variabel Akuntabilitas
 X_2 : Variabel Transparansi
 X_3 : Variabel Peran Perangkat Desa
 X_4 : Variabel Partisipasi Masyarakat
 e : Error/Residual

3.8.2 Uji Goodness of Fit (Uji Kesesuaian Model)

3.8.2.1 Uji F

Uji statistik F bermanfaat untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menetapkan tingkat signifikansi sebesar 5%. Nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima;
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (Prayitno, 2014).

3.8.2.2 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau analisa R^2 (*R Square*) digunakan untuk menunjukkan proporsi variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh seluruh variabel independen secara simultan. Persentase sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Dalam regresi linear berganda, *Adjusted R Square* lebih tepat digunakan karena mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model (Sugiyono, 2012).

3.8.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan langkah penting dalam penelitian kuantitatif untuk menguji kebenaran dugaan atau asumsi yang telah dirumuskan sebelumnya berdasarkan teori dan kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen (akuntabilitas, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pengelolaan keuangan desa). Uji hipotesis yang digunakan terdiri dari Uji Parsial (Uji t).

Uji signifikansi parameter parsial, atau Uji-t, merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam satu sampel. Hipotesis ini berfokus pada pertanyaan apakah nilai tertentu, yang diajukan sebagai hipotesis, berbeda secara signifikan dari nilai rata-rata dalam sampel. Uji ini dilakukan dengan menggunakan statistik t, yang membandingkan nilai terhitung (nilai yang diperoleh dari sampel) dengan nilai kritis dari tabel distribusi t. Nilai kritis ini merupakan batas yang menentukan apakah perbedaan antara nilai terhitung dan rata-rata sampel cukup besar untuk dianggap signifikan secara statistik. Berikut adalah beberapa ketentuan penting dalam melakukan uji signifikansi parameter parsial:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima;
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (Ghozali, 2016).

Untuk mengetahui nilai t tabel, kita perlu mencari derajat kebebasan (df) terlebih dahulu. Derajat kebebasan dihitung dengan rumus $n-k-1$, di mana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel

Kecamatan Dawe merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang terdiri dari 18 desa dengan luas wilayah sekitar 35,67 km². Kecamatan ini memiliki karakteristik desa yang beragam, mulai dari desa dengan potensi pertanian, perdagangan, hingga industri kecil menengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Dawe mencapai 58.742 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.647 jiwa per km². Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani (35%), pedagang (28%), buruh industri (20%), dan sisanya bekerja di sektor jasa dan lainnya.

Kecamatan Dawe merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang terdiri dari 18 desa dengan luas wilayah sekitar 35,67 km². Kecamatan ini memiliki karakteristik desa yang beragam, mulai dari desa dengan potensi pertanian, perdagangan, hingga industri kecil menengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Dawe mencapai 58.742 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.647 jiwa per km². Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani (35%), pedagang (28%), buruh industri (20%), dan sisanya bekerja di sektor jasa dan lainnya.

Alokasi dana desa di Kecamatan Dawe pada tahun 2023 bervariasi antara Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa, tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan. Berdasarkan besaran dana desa tersebut, peneliti mengelompokkan 18 desa ke dalam tiga strata:

- a. Strata besar dengan dana desa > Rp 1,2 miliar (6 desa),
- b. Strata sedang dengan dana desa Rp 1,0–1,2 miliar (7 desa), dan
- c. Strata kecil dengan dana desa < Rp 1,0 miliar (5 desa).

Dari masing-masing strata dipilih sampel desa secara proporsional sehingga diperoleh 12 desa sebagai sampel penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti membagikan total 130 kuesioner kepada responden yang tersebar di 12 desa sampel. Dari jumlah tersebut, sebanyak 122

kuesioner kembali, dan setelah dilakukan penyaringan serta verifikasi kelengkapan data, sebanyak 120 kuesioner dinyatakan layak dan dapat diolah untuk analisis lebih lanjut. Berikut adalah rincian jumlah kuesioner:

Tabel IV.1
Jumlah Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dibagikan	130
Kuesioner yang kembali	122
Kuesioner yang layak diolah	120

4.2 Deskripsi Identitas Responden

Penelitian ini melibatkan 120 responden yang terdiri dari perangkat desa dan perwakilan masyarakat dari 12 desa sampel di Kecamatan Dawe. Responden dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa. Komposisi responden mencerminkan keberagaman dari sisi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan atau posisi di desa, serta lama keterlibatan mereka dalam kegiatan pemerintahan desa. Berikut ini adalah rincian identitas responden yang ditampilkan dalam bentuk tabel berdasarkan lima aspek utama:

4.2.1 Identitas Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2
Identitas Responden Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Jumlah Responden	Percentase (%)
< 30 tahun	6	5
31 – 40 tahun	34	28
41 – 50 tahun	50	42
51 – 60 tahun	26	22
> 60 tahun	4	3
Total	120	100

Berdasarkan Tabel 4.2, mayoritas responden (42%) berada pada rentang usia 41–50 tahun. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia

produktif dan matang secara pengalaman. Usia ini dinilai strategis karena biasanya mereka telah memiliki pengalaman kerja yang cukup panjang, sehingga dinilai cukup kompeten dalam memberikan informasi yang relevan terkait keterlibatan dalam kegiatan desa.

4.2.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel IV.3
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Percentase (%)
Laki-laki	78	65
Perempuan	42	35
Total	120	100

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (65%). Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi laki-laki dalam kegiatan pemerintahan desa masih dominan, meskipun peran perempuan (35%) juga cukup signifikan. Ini menunjukkan adanya keterlibatan yang relatif baik dari perempuan dalam ranah publik di tingkat desa.

4.2.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel IV.4
Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Percentase (%)
SMP/sederajat	18	15
SMA/sederajat	54	45
Diploma/S1	42	35
S2	6	5
Total	120	100

Sebagian besar responden (45%) memiliki latar belakang pendidikan SMA/sederajat, diikuti oleh lulusan Diploma/S1 (35%). Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi,

yang mendukung kemampuan mereka dalam memahami proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa secara lebih rasional dan sistematis.

4.2.4 Identitas Responden Berdasarkan Jabatan/Posisi

Tabel IV.5
Identitas Responden Berdasarkan Jabatan/Posisi

Jabatan/Posisi	Jumlah Responden	Persentase (%)
Kepala Desa	6	5
Sekretaris Desa	12	10
Bendahara Desa	10	8
Perangkat Lainnya	20	17
Anggota BPD	30	25
Tokoh Masyarakat/ Warga Aktif	42	35
Total	120	100

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa komposisi responden paling banyak berasal dari kalangan tokoh masyarakat/warga aktif (35%) dan anggota BPD (25%). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini banyak melibatkan aktor-aktor kunci non-struktural maupun struktural dalam masyarakat desa yang aktif dalam perencanaan dan evaluasi program desa, memberikan sudut pandang yang kaya dan representatif.

4.2.5 Identitas Responden Berdasarkan Lama Bertugas/Keterlibatan

Tabel IV.6
Identitas Responden Berdasarkan Lama Bertugas/Keterlibatan

Lama Bertugas /Keterlibatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
3 – 5 tahun	38	32
5 – 10 tahun	58	48
> 10 tahun	24	20
Total	120	100

Sebagian besar responden (48%) telah terlibat dalam kegiatan pemerintahan desa selama 5–10 tahun. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman yang cukup lama, yang menjadikan informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan mencerminkan dinamika yang telah mereka alami secara langsung dalam proses pembangunan desa.

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Sebelum menganalisis persepsi responden terhadap masing-masing variabel, perlu dijelaskan terlebih dahulu kriteria penilaian yang digunakan untuk mengkategorikan tingkat persepsi responden. Berikut adalah tabel kriteria penilaian berdasarkan rentang nilai rata-rata:

Tabel IV.7
Kriteria Penilaian Persepsi Responden terhadap Variabel¹

Rentang Nilai Rata-rata	Kategori	Keterangan
4,21-5,00	Sangat Tinggi	Persepsi sangat positif terhadap aspek yang dinilai
3,41-4,20	Tinggi	Persepsi positif terhadap aspek yang dinilai
2,61-3,40	Sedang	Persepsi cukup/netral terhadap aspek yang dinilai
1,81-2,60	Rendah	Persepsi negatif terhadap aspek yang dinilai
1,00-1,80	Sangat Rendah	Persepsi sangat negatif terhadap aspek yang dinilai

4.3.1 Persepsi Responden terhadap Variabel Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas mencerminkan sejauh mana pemerintah desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara terbuka, jujur, dan sistematis. Delapan pernyataan diajukan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap aspek ini.

¹ Kriteria penilaian ini diadaptasi dari skala Likert 5 poin dengan pembagian interval yang sama untuk setiap kategori (interval = 0,80), dimana nilai 1 menunjukkan persepsi paling negatif dan nilai 5 menunjukkan persepsi paling positif (Sugiyono, 2017).

Tabel IV.8
Persepsi Responden terhadap Variabel Akuntabilitas

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Pemerintah desa selalu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat	3	6	15	50	46	120	4.08	Tinggi
2	Laporan penggunaan dana desa dibuat secara lengkap dan detail	5	10	22	48	35	120	3.79	Tinggi
3	Pemerintah desa selalu menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	7	14	35	38	26	120	3.47	Sedang
4	Setiap keputusan penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang jelas	12	16	30	36	26	120	3.30	Sedang
5	Pemerintah desa terbuka menerima kritik dan saran dari masyarakat terkait pengelolaan keuangan	6	11	25	45	33	120	3.68	Tinggi
6	Terdapat mekanisme pengawasan yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa	10	15	32	40	23	120	3.36	Sedang
7	Pemerintah desa selalu menjelaskan alasan di balik setiap keputusan anggaran	8	12	30	42	28	120	3.53	Tinggi
8	LPJ keuangan desa mudah dipahami oleh masyarakat	10	18	36	38	18	120	3.19	Sedang

Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian tinggi pada pernyataan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa (4,08), kelengkapan laporan (3,79), keterbukaan terhadap kritik (3,68), dan penjelasan anggaran (3,53). Namun demikian, beberapa aspek seperti ketepatan waktu pelaporan (3,47), mekanisme pengawasan (3,36), bukti keputusan anggaran (3,30), serta kemudahan pemahaman LPJ (3,19) dinilai sedang. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dinilai cukup baik, namun masih perlu penguatan dalam hal keteraturan dokumentasi dan transparansi bukti keputusan.

4.3.2 Persepsi Responden terhadap Variabel Transparansi

Variabel transparansi mengukur sejauh mana masyarakat dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa secara terbuka dan mudah.

Tabel IV.9
Persepsi Responden terhadap Variabel Transparansi

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Informasi tentang anggaran desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat	1	4	28	50	37	120	3,82	Tinggi
2	Pemerintah desa mempublikasikan laporan keuangan di tempat yang mudah diakses masyarakat	1	6	30	56	27	120	3,69	Tinggi
3	Proses penyusunan anggaran desa dilakukan secara terbuka	4	10	45	46	15	120	3,30	Tinggi
4	Masyarakat mengetahui jumlah dan sumber dana yang diterima desa	16	6	47	9	42	120	3,46	Sedang
5	Informasi tentang program dan kegiatan desa disampaikan secara jelas kepada masyarakat	10	25	47	31	7	120	3,00	Sedang
6	Pemerintah desa menyediakan papan informasi yang memuat data keuangan desa	3	31	45	32	9	120	3,08	Sedang
7	Proses pengambilan keputusan keuangan dilakukan secara terbuka	8	33	44	25	10	120	3,00	Sedang
8	Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang realisasi anggaran desa	16	6	47	9	42	120	3,46	Sedang

Meskipun beberapa aspek transparansi mendapat penilaian tinggi, terdapat lima aspek yang dinilai sedang dan menunjukkan adanya hambatan dalam akses informasi keuangan desa. Aspek yang paling lemah adalah penyampaian informasi program dan kegiatan desa (3,00) serta keterbukaan proses pengambilan keputusan keuangan (3,00). Kedua aspek ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih

kesulitan memperoleh informasi yang jelas tentang program desa dan proses pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya transparan.

Selain itu, penyediaan papan informasi yang memuat data keuangan desa (3,08) juga dinilai sedang, menunjukkan bahwa media informasi publik yang mudah diakses masih belum optimal. Hal ini diperkuat dengan dua aspek lainnya yang memperoleh nilai 3,46, yaitu pengetahuan masyarakat tentang jumlah dan sumber dana desa serta kemudahan akses informasi realisasi anggaran desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah berupaya menyediakan akses informasi, masih terdapat kesenjangan dalam hal penyampaian informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Kelemahan utama terletak pada komunikasi yang efektif dan penyediaan sarana informasi yang memadai, sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi lengkap tentang pengelolaan keuangan desa secara real-time.

4.3.3 Persepsi Responden terhadap Variabel Peran Perangkat Desa

Variabel ini menggambarkan sejauh mana perangkat desa menjalankan fungsinya secara profesional dalam mengelola dana desa.

Tabel IV.10
Persepsi Responden terhadap Variabel Peran Perangkat Desa

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Perangkat desa memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola keuangan desa	8	24	39	33	16	120	2,99	Sedang
2	Perangkat desa memahami dengan baik peraturan tentang pengelolaan keuangan desa	9	32	45	25	9	120	2,81	Sedang
3	Perangkat desa aktif dalam melakukan perencanaan keuangan desa	1	15	60	32	12	120	3,27	Tinggi
4	Perangkat desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0	19	76	25	0	120	3,05	Sedang
5	Perangkat desa memiliki integritas yang tinggi	9	23	46	31	11	120	2,99	Sedang

	dalam mengelola keuangan desa								
6	Perangkat desa responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat	9	23	45	31	12	120	3,03	Sedang
7	Perangkat desa bekerja sama dengan baik dalam tim pengelolaan keuangan	5	11	76	27	1	120	2,95	Sedang
8	Perangkat desa selalu mengikuti perkembangan peraturan terbaru tentang keuangan desa	9	23	46	31	11	120	2,99	Sedang

Berdasarkan hasil survei terhadap 120 responden, persepsi terhadap peran perangkat desa menunjukkan beberapa kelemahan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius. Aspek yang paling mengkhawatirkan adalah pemahaman perangkat desa terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa (2,81), yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai perangkat desa belum menguasai landasan hukum yang seharusnya menjadi pedoman kerja mereka.

Selain itu, enam aspek lainnya juga berada dalam kategori sedang, mencerminkan kinerja yang belum optimal. Kompetensi perangkat desa dalam mengelola keuangan (2,99) dan integritas dalam pengelolaan keuangan (2,99) menunjukkan adanya keraguan masyarakat terhadap kapasitas dan kejujuran perangkat desa. Aspek pelaksanaan tugas sesuai ketentuan (3,05) juga dinilai sedang, mengindikasikan inkonsistensi dalam menjalankan tanggung jawab.

Lebih lanjut, responsivitas terhadap aspirasi masyarakat (3,03), kerja sama tim (2,95), dan upaya mengikuti perkembangan peraturan terbaru (2,99) juga berada dalam kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perangkat desa masih perlu peningkatan signifikan dalam hal profesionalisme, kompetensi teknis, dan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

4.3.4 Persepsi Responden terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu indikator penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Pada sub bab ini, akan dipaparkan bagaimana pandangan responden terhadap

keterlibatan masyarakat, baik dalam tahap perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan desa yang didanai oleh dana desa.

Tabel IV.11
Persepsi Responden terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Masyarakat aktif menghadiri pertemuan yang membahas anggaran desa	5	14	39	45	17	120	3,34	Tinggi
2	Masyarakat memberikan masukan dalam penyusunan rencana anggaran desa	4	11	40	51	14	120	3,47	Tinggi
3	Masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan desa	6	18	41	43	12	120	3,23	Tinggi
4	Masyarakat aktif bertanya tentang penggunaan dana desa	9	22	56	25	8	120	2,93	Sedang
5	Masyarakat memberikan saran dan kritik yang membangun terkait pengelolaan keuangan desa	10	26	47	31	6	120	2,93	Sedang
6	Masyarakat ikut serta dalam evaluasi program dan kegiatan desa	9	23	46	31	11	120	3,03	Sedang
7	Masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa	2	21	74	23	0	120	2,99	Sedang
8	Masyarakat aktif menyampaikan aspirasi melalui forum-forum yang tersedia	9	23	46	31	11	120	3,03	Sedang

Meskipun beberapa aspek partisipasi masyarakat mendapat penilaian tinggi, terdapat lima aspek yang dinilai sedang dan mengindikasikan lemahnya keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan kontrol. Aspek yang paling lemah adalah keaktifan masyarakat dalam bertanya tentang penggunaan dana desa (2,93) dan pemberian saran serta kritik yang membangun (2,93). Kedua aspek ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung pasif dalam melakukan fungsi pengawasan dan kurang berani menyampaikan pendapat kritis.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam evaluasi program dan kegiatan desa (3,03) juga dinilai sedang, menunjukkan lemahnya keterlibatan dalam tahap akhir siklus pengelolaan dana desa. Rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa (2,99) berada dalam kategori sedang, mengindikasikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya merasa memiliki peran dalam pengawasan keuangan desa.

Keaktifan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui forum yang tersedia (3,03) juga dinilai sedang, menunjukkan bahwa pemanfaatan saluran komunikasi formal masih belum optimal. Kondisi ini mencerminkan perlunya upaya lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat dalam berpartisipasi aktif, terutama dalam fungsi pengawasan dan penyampaian aspirasi secara konstruktif.

4.3.5 Persepsi Responden terhadap Variabel Kualitas Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa yang baik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Sub bab ini membahas sejauh mana masyarakat menilai kualitas pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tabel IV.12
Persepsi Responden terhadap Variabel Kualitas Pengelolaan Dana Desa

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Keterangan
		1	2	3	4	5			
1	Perencanaan keuangan desa dilakukan dengan baik dan sistematis	1	4	25	55	35	120	3,83	Tinggi
2	Pelaksanaan anggaran desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	3	5	30	55	27	120	3,69	Tinggi
3	Penatausahaan keuangan desa dilakukan dengan tertib dan teratur	2	7	36	50	25	120	3,58	Tinggi
4	Pelaporan keuangan desa dibuat secara lengkap dan tepat waktu	5	15	50	42	8	120	3,08	Sedang
5	Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan	7	20	46	39	8	120	2,98	Sedang

	sesuai dengan ketentuan yang berlaku								
6	Pengelolaan keuangan desa telah mengikuti prinsip-prinsip good governance	4	18	50	42	6	120	3,03	Sedang
7	Dana desa digunakan untuk program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat	3	15	56	36	10	120	3,10	Sedang
8	Pengelolaan keuangan desa berkontribusi positif terhadap pembangunan desa	2	12	50	40	16	120	3,27	Tinggi
9	Sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik	5	15	47	42	11	120	3,18	Sedang
10	Pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5	14	43	43	15	120	3,25	Sedang

Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat enam aspek pengelolaan dana desa yang dinilai sedang oleh responden dan memerlukan perbaikan mendesak. Aspek yang paling mengkhawatirkan adalah pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan (2,98), yang menunjukkan bahwa masyarakat menilai pemerintah desa belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pertanggungjawaban sesuai regulasi yang berlaku.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip good governance (3,03) dan pelaporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu (3,08) juga dinilai sedang, mengindikasikan lemahnya implementasi tata kelola yang baik dan inkonsistensi dalam penyampaian laporan keuangan. Pemanfaatan dana desa untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat (3,10) berada dalam kategori sedang, menunjukkan adanya keraguan masyarakat terhadap efektivitas penggunaan dana desa.

Sementara itu, indikator “Dana desa digunakan untuk program bermanfaat” memperoleh skor 3,10 (*sedang*), dan “Pengelolaan berkontribusi terhadap pembangunan desa” memperoleh 3,27 (*tinggi*). Ini menunjukkan adanya pengakuan atas manfaat penggunaan dana desa, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas pemanfaatannya.

4.4 Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan terhadap 42 item pertanyaan yang terdiri dari 8 item untuk variabel akuntabilitas, 8 item untuk variabel transparansi, 8 item untuk variabel peran perangkat desa, 8 item untuk variabel partisipasi masyarakat, dan 10 item untuk variabel kualitas pengelolaan keuangan desa. Dengan jumlah responden 120 dan degree of freedom (df) = 118, nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 0,1793.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel IV.13
Hasil Uji Validitas

No	Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1	Item_1	0.5258	0.1793	Valid
2	Item_2	0.5065	0.1793	Valid
3	Item_3	0.7447	0.1793	Valid
4	Item_4	0.5541	0.1793	Valid
5	Item_5	0.7689	0.1793	Valid
6	Item_6	0.5152	0.1793	Valid
7	Item_7	0.7430	0.1793	Valid
8	Item_8	0.7564	0.1793	Valid
9	Item_9	0.6500	0.1793	Valid
10	Item_10	0.3051	0.1793	Valid
11	Item_11	0.3961	0.1793	Valid
12	Item_12	0.5071	0.1793	Valid
13	Item_13	0.5238	0.1793	Valid
14	Item_14	0.3961	0.1793	Valid
15	Item_15	0.2010	0.1793	Valid
16	Item_16	0.2404	0.1793	Valid
17	Item_17	0.7175	0.1793	Valid

18	Item_18	0.3856	0.1793	Valid
19	Item_19	0.7960	0.1793	Valid
20	Item_20	0.5659	0.1793	Valid
21	Item_21	0.7777	0.1793	Valid
22	Item_22	0.7750	0.1793	Valid
23	Item_23	0.5979	0.1793	Valid
24	Item_24	0.7777	0.1793	Valid
25	Item_25	0.7258	0.1793	Valid
26	Item_26	0.6993	0.1793	Valid
27	Item_27	0.5799	0.1793	Valid
28	Item_28	0.3984	0.1793	Valid
29	Item_29	0.4189	0.1793	Valid
30	Item_30	0.7777	0.1793	Valid
31	Item_31	0.4650	0.1793	Valid
32	Item_32	0.7777	0.1793	Valid
33	Item_33	0.2164	0.1793	Valid
34	Item_34	0.4650	0.1793	Valid
35	Item_35	0.4267	0.1793	Valid
36	Item_36	0.7583	0.1793	Valid
37	Item_37	0.5313	0.1793	Valid
38	Item_38	0.8222	0.1793	Valid
39	Item_39	0.2588	0.1793	Valid
40	Item_40	0.3165	0.1793	Valid
41	Item_41	0.1986	0.1793	Valid
42	Item_42	0.8004	0.1793	Valid

Sumber: Output SPSS Lampiran 2

Seluruh nilai r hitung pada masing-masing item lebih besar dari nilai r tabel (0,1793), yang berarti seluruh item dalam instrumen kuesioner memenuhi syarat validitas. Ini mengindikasikan bahwa setiap item mampu merepresentasikan indikator dari masing-masing variabel secara akurat. Tidak ada satupun item yang

harus dieliminasi, sehingga seluruh item dapat digunakan untuk pengukuran dalam tahap analisis berikutnya.

4.4.2 Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi dan keandalan kuesioner sebagai alat ukur variabel penelitian. Hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha menunjukkan nilai sebagai berikut:

Tabel IV.14
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Cronbach Alpha	Hasil	Keterangan
Akuntabilitas (X ₁)	8	>0.6	0.831	Reliabel
Transparansi (X ₂)	8	>0.6	0.697	Reliabel
Peran Perangkat Desa (X ₃)	8	>0.6	0.894	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X ₄)	8	>0.6	0.808	Reliabel
Kualitas Pengelolaan DD (Y)	10	>0.6	0.680	Reliabel

Sumber: Output SPSS Lampiran 3

Hasil uji reliabilitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0.60. hal ini dapat dikatakan bahwa semua instrumen reliabel. Sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji nomalitas didefinisikan sebagai salah satu uji signifikansi dari pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen guna melihat bentuk atau jenis distribusinya menunjukkan normal ataupun sebaliknya. Uji normalitas pada kajian ini menggunakan Kolmogorov-smirnov dengan menggunakan SPSS. Menggunakan kriteria jika nilai signifikan $> 0,05$ maka persamaan regresi dalam kajian ini dapat dikatakan normal dan sebaliknya. Dari hasil uji menggunakan SPSS didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

Tabel IV.15
Hasil Uji Normalitas

		Unstandarized Residual
N		120
Normal Paramaters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2.63107260
Most Extreme Differences	Absolute	.041
	Positive	.028
	Negative	-.041
Test Statistic		.041
Asymp. Sig (2-tailed)		.200

Sumber: Output SPSS Lampiran 4

Dari tabel hasil perhitungan menggunakan SPSS dapat dipahami bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Sehingga dalam arti hasil nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05 (Basuki 2019). Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini berfungsi untuk mengetahui suatu model regresi yang ditemukan adanya korelasi tinggi antar variabel independent, guna mengetahuinya dapat diamati pada nilai VIF dan nilai tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerancenya $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas (Basuki 2019). Berikut hasil analisis,

Tabel IV.16
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Akuntabilitas	0,350	2,859
Transparansi	0,636	1,598
Peran Perangkat Desa	0,256	3,910
Partisipasi Masyarakat	0,207	4,842

a. Dependent Variable: Kualitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Output SPSS Lampiran 5

Hasil uji multikolinearitas yang tersaji dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel-variabel independen kurang dari 10 dengan nilai tolerance lebih dari 0,1. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdeteksi gejala multikolinearitas antar variabel independen dengan model regresi.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan terdapat ketidaksamaan variance antar residual (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan uji *Glejser* dengan kriteria apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas mennggunakan spss,

Tabel 4.17
Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Sig
Constant	
Akuntabilitas	0,376
Transparansi	0,302
Peran Perangkat Desa	0,695
Partisipasi Masyarakat	0,164

Sumber: Output SPSS Lampiran 6

Berdasarkan pada tabel tersebut, diketahui bahwa diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,376 pada variabel akuntabilitas, sebesar 0,302 pada variabel transparansi, sebesar 0,695 pada variabel peran perangkat desa, dan sebesar 0,164 pada variabel kepemilikan institusional. Hasil-hasil ini menunjukkan nilai signifikasi yang lebih dari 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.6 Analisis Data

4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dilakukan ke seluruh variabel independent terhadap variabel dependen untuk melihat terdapat pengaruh dan tidaknya. Berikut hasil analisis yang dilakukan:

Tabel IV.18
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandarized B	Coefficient Std. Error	t	Sig.
(Constant)	9,516	1,351	7,044	,000
X1	,166	,062	2,688	,008
X2	,318	,059	5,342	,000
X3	,097	,084	1,159	,249
X4	,270	,110	2,459	,015

Sumber: Output SPSS Lampiran 7

Berdasarkan tabel di atas, hasil persamaan regresi dan interpretasinya adalah nilai konstanta (a) sebesar 9,516 artinya apabila variabel akuntabilitas, transparansi, peran perangkat, dan partisipasi masyarakat di asumsikan bernilai 0 maka nilai kualitas pengelolaan dana desa adalah 9,516. Selanjut berdasarkan tabel hasil uji regresi diperoleh nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas (X1) yaitu 0,166 sementara untuk transparansi (X2) sebesar 0,318 kemudian untuk peran perangkat desa (X3) 0,097 dan partisipasi masyarakat (X4) sebesar 0,270. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut (Basuki 2019):

$$Y = 9,516 + 0,166 X_1 + 0,318 X_2 + 0,097 X_3 + 0,270 X_4 + e$$

Artinya:

- 1) Konstanta (a) sebesar 9,516 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05).

berarti jika semua variabel independen — yaitu akuntabilitas, transparansi,

peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat — dianggap tetap, maka kualitas pengelolaan dana desa tetap bernilai positif, yaitu sebesar 9,516. Artinya, secara umum terdapat fondasi kualitas pengelolaan dana desa yang sudah baik meskipun tidak dipengaruhi oleh perubahan variabel-variabel tersebut.

- 2) Variabel Akuntabilitas (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,166 dengan nilai signifikansi 0,008 ($< 0,05$). Artinya, variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitasnya, maka akan meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.
- 3) Variabel Transparansi (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,318 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Artinya, variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin meningkat pula kualitas pengelolaan dana desa.
- 4) Variabel Peran Perangkat Desa (X3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,097 dengan nilai signifikansi 0,249 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa.
- 5) Variabel Partisipasi Masyarakat (X4) memiliki koefisien regresi sebesar 0,270 dengan nilai signifikansi 0,015 ($< 0,05$). Artinya, variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi

partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan dana tersebut.

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, variabel peran perangkat desa tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peran perangkat desa penting, namun dalam konteks penelitian ini, peran tersebut belum secara signifikan meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

4.6.2 Uji Goodness of Fit (Uji Kesesuaian Model)

Uji Goodness of Fit atau uji-F pada penelitian ini digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama) dengan kriteria penilaian jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh secara signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Hasil uji-F dengan SPSS adalah,

Tabel 4.19

Hasil Uji-F

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
Regression	1882.142	4	470.536	65.687	0,000
Residual	823.783	115	7.163		
Total	2705.925	119			

Sumber: Output SPSS Lampiran 8

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap

variabel kualitas pengelolaan dana desa.

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R^2 digunakan sebagai alat uji kesesuaian model. R^2 mencerminkan kemampuan model regresi dalam menjelaskan sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Sugiharti, 2021). Nilai R^2 yang mendekati satu mengartikan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Mukhtaruddin, 2019). Berikut merupakan hasil koefisien determinasi:

Tabel IV.20
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,834	0,696	0,685	2,676

Sumber: Output SPSS Lampiran 9

Berdasarkan tabel tersebut dapat difahami bahwa, Nilai R (korelasi berganda) sebesar 0,834 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Nilai ini berada pada rentan.

Selanjutnya nilai Adjusted R Square sebesar 0,685 mengindikasikan bahwa 68,5% variasi atau perubahan yang terjadi pada kualitas pengelolaan dana desa (Y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, model regresi yang dibentuk memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabel dependen. Sisanya sebesar 31,5% (100% - 68,5%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, seperti misalnya faktor budaya organisasi, kapasitas sumber daya

manusia, sistem pengawasan eksternal, maupun kebijakan pemerintah yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.6.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji parsial (uji t), yang bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (sendiri-sendiri). Berikut adalah hasil uji parsial,

Tabel IV.21j
Hasil Uji-t

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Akuntabilitas	2,688	0,008	H1 diterima
Transparansi	5,342	0,000	H2 diterima
Peran Perangkat Desa	1,159	0,249	H3 ditolak
Partisipasi Masyarakat	2,459	0,15	H4 diterima

Sumber: Output SPSS Lampiran 10

Berdasarkan tabel tersebut, maka hasil uji signifikansi individual dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Akuntabilitas (X1)

Nilai t hitung sebesar 2,688 dengan signifikansi (Sig.) sebesar $0,008 < 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti H_1 yang berbunyi “Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa” diterima. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang ditunjukkan oleh pemerintah desa, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan dana desa.

2) Transparansi (X2)

Nilai t hitung sebesar 5,342 dengan signifikansi (Sig.) sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_2 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti H_2 yang berbunyi

“Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa” diterima. Semakin transparan informasi keuangan disampaikan kepada masyarakat, maka kepercayaan, partisipasi, dan efektivitas pengelolaan dana desa akan semakin meningkat.

3) Peran Perangkat Desa (X3)

Nilai t hitung sebesar 1,159 dengan signifikansi (Sig.) sebesar $0,249 > 0,05$, maka H_3 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini berarti H_3 yang berbunyi “Peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa” ditolak. Meskipun perangkat desa terlibat dalam proses pengelolaan, namun dalam konteks penelitian ini, peran mereka belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan dana desa..

4) Partisipasi Masyarakat (X4)

Nilai t hitung sebesar 2,459 dengan signifikansi (Sig.) sebesar $0,015 < 0,05$, maka H_4 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti H_4 yang berbunyi “Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa” diterima. Semakin aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana desa, maka pengelolaan keuangan desa menjadi lebih berkualitas, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil uji t menunjukkan bahwa dari keempat variabel independen yang diuji, tiga di antaranya yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa, sedangkan peran perangkat desa tidak

menunjukkan pengaruh signifikan dalam konteks penelitian ini.

4.7 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa, sedangkan peran perangkat desa tidak berpengaruh secara signifikan. Temuan ini dapat didiskusikan lebih lanjut dengan mengaitkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

4.7.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji regresi parsial, variabel akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa, dengan nilai signifikansi 0,008 (< 0,05). Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka semakin baik kualitas pengelolaan dana desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiani & Estiningrum (2021), Latif & Savitri (2021), Subandra (2022), Sukmawati & Nurfitriani (2019), Faizzatus Solihah et al. (2022), Mutia Basri et al. (2020), serta Angelia & Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menegaskan pentingnya tanggung jawab dan pelaporan yang jelas dalam setiap proses penggunaan dana desa agar pengelolaan dapat dilakukan secara optimal dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

4.7.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi (X2) juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05), yang berarti semakin terbuka pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pengelolaan dana, maka kualitas pengelolaan dana desa semakin meningkat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Alfiani &

Estiningrum (2021), Latif & Savitri (2021), Faizzatus Solihah et al. (2022), dan Mutia Basri et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa transparansi berperan penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa. Namun, berbeda dengan penelitian Subandra (2022), Sukmawati & Nurfitriani (2019), serta Angelia & Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh konteks sosial, budaya, serta tingkat literasi masyarakat terhadap informasi publik di lokasi penelitian masing-masing.

4.7.3 Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peran perangkat desa (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa (nilai signifikansi $0,249 > 0,05$). Temuan ini bertentangan dengan penelitian Faizzatus Solihah et al. (2022) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun perangkat desa secara struktural terlibat dalam pengelolaan dana desa, namun dalam konteks penelitian ini, kontribusi mereka belum optimal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan. Faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan, lemahnya koordinasi, atau dominasi pengambilan keputusan oleh kepala desa bisa menjadi penyebabnya.

4.7.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa

Variabel partisipasi masyarakat (X4) terbukti berpengaruh secara signifikan dengan nilai signifikansi $0,015 (< 0,05)$. Hal ini mengindikasikan bahwa

keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa mampu meningkatkan kualitas pengelolaan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Subandra (2022), Mutia Basri et al. (2020), dan Angelia & Rahayu (2020) yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan pengelolaan dana desa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Partisipasi masyarakat juga mencerminkan adanya transparansi dan akuntabilitas yang saling memperkuat, serta meningkatkan rasa memiliki terhadap pembangunan desa.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan dana desa, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- 1) Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah desa, semakin baik pula kualitas pengelolaan dana desa.
- 2) Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Keterbukaan informasi yang diberikan kepada masyarakat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam proses pengelolaan.
- 3) Peran perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perangkat desa belum optimal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana.
- 4) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis,

- 1) Implikasi Teoritis: Penelitian ini memperkuat teori good governance yang

menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengelolaan dana desa.:

- 2) Implikasi Praktis: Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini menjadi dasar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Selain itu, upaya mendorong partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar pengelolaan dana desa lebih efektif. Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat desa agar berkontribusi lebih optimal.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner, tanpa dilengkapi wawancara mendalam atau observasi langsung, sehingga kurang menggambarkan konteks dan dinamika sosial secara komprehensif.
- 2) Variabel yang digunakan terbatas pada empat faktor, padahal faktor lain seperti budaya organisasi, kepemimpinan kepala desa, atau pengawasan eksternal juga mungkin berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:

- 1) Bagi Pemerintah Desa: Perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui pelaporan keuangan secara rutin dan terbuka kepada masyarakat serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan dana desa.

- 2) Bagi Perangkat Desa: Diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan terkait manajemen keuangan desa agar peran perangkat desa lebih optimal dalam pengelolaan dana desa.
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), serta mempertimbangkan variabel lain yang relevan agar hasilnya lebih komprehensif dan mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif. (2021). *Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan, 8(2), 134–146.

Adisasmita, R. (2011). *Pembangunan Desa: Strategi dan Model*. Graha Ilmu.

Alfiani, S. N., & Estiningrum, R. (2021). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10(5), 1–15.

Angelia, L. F., & Rahayu, S. M. (2020). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(8), 1–13.

Arnstein, S. R. (1969). “A Ladder of Citizen Participation,” *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.

Artasandi, R., Nugroho, A., & Lestari, D. (2024). *Tata kelola keuangan desa berbasis good governance*. Jakarta: Penerbit Pemerintahan Daerah.

Basri, Y. M., Dwirandra, A. A. N. B., & Suardana, I. K. (2020). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa*. E-Jurnal Akuntansi, 30(8), 1980–1994.

Dewi, R. K. (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.

Dharmawan, A. (2010). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik*. (Penelitian Tidak Dipublikasikan). Universitas Indonesia.

Endahwati, L. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Faizzatul Solihah. (2022). *Pengaruh peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan, 6(2), 89–102.

Faizzatus Solihah, R., Anindita, P. R., & Hidayatullah, M. F. (2022). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 11(2), 89–97.

Ghartery, J.B. (2004). *Accountability and Good Governance in Public Administration*. New York: Prentice Hall.

Ghozali, I. (2016). *Applikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2016). *Applikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Intan, R. & Mussadun, M. (2013). *Sosiologi Pembangunan: Teori dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama.

Isbandi, R. (2007). *Pemberdayaan Masyarakat: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.

Latif, A., & Savitri, E. (2021). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 13(2), 112–124.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN.

Lenaini, M. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mutia Basri, Y., Dwirandra, A. A. N. B., & Suardana, I. K. (2020). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 10(1), 23–34.

Nasution, A. (2019). *Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah: Implikasi terhadap tata kelola keuangan desa*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 10(1), 21–32.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Puspa, D. N., & Prasetyo, A. (2020). *Akuntabilitas dan pengelolaan dana desa: Studi pada desa di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21(1), 44–50.

Saputra, R., & Farhan, A. (2021). *Pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 18(3), 54–63.

Slamet, M. (1994). *Pendidikan Nonformal dan Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Subandra, I. M. (2022). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Riset dan Akuntansi, 13(1), 70–81.

Sudriamunawar. (2006). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. (2005). *Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.

Sukmawati, A., & Nurfitriani, R. (2019). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 8(3), 25–32.

Sumaryadi, I. (2010). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

Supriyadi, I., Wahyuni, D., & Fadillah, M. (2022). *Kompetensi perangkat desa dan efektivitas pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 67–80.

Suryono, A. (2001). *Pengantar Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wahyuni, S., & Harto, A. G. (2012). *Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Yadav, P. dalam UNAPDI. (1980). *Community Participation in Development Planning*. [United Nations Asian and Pacific Development Institute].

Yesi Mutia Basril. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa*. Bandung: Alfabeta.